

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Wati (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh Praktik *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM), penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen GCG diproksikan dengan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) dan menggunakan variabel dependen kinerja keuangan perusahaan diukur dengan ROE dan NPM. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2010. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE, dan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan NPM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut dan implementasi penerapan GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan investor terhadap perusahaannya.

Dewi dan Widagdo (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* pada kinerja perusahaan, penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. CSR diukur dengan *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) yaitu dengan membandingkan jumlah CSR yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan GRI sebanyak 79 item dan *Good Corporate Governance* diukur dengan presentase kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris yaitu jumlah seluruh anggota dewan komisaris, ukuran dewan direksi yaitu jumlah anggota dewan direksi, presentase komisaris independen, dan keberadaan komite audit yang diukur dengan *dummy*. Kinerja perusahaan diukur dengan ROE, yaitu Laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis jalur. Teori yang digunakan dalam penelitian Dewi dan Widagdo yaitu teori *Stakeholders*, teori *The Triple Bottom Line*, dan teori *Agency*. Hasil penelitian ini menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*, hasil tersebut membuktikan secara empiris bahwa perusahaan dalam rangka meningkatkan GCG perlu meningkatkan CSR. Komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada

pengembangan ekonomi dan keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan CSR dan prinsip GCG. Hasil hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, hasil ini menunjukkan kuatnya pengawasan kepemilikan institusional terhadap kebijakan manajemen, bertanggung jawabnya dewan komisaris dan direksi pada fungsinya masing-masing, keefektifan dan independensi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi monitoring serta konsistennya pengawasan dan pengendalian intern yang dilakukan Komite audit. Hasil hipotesis dari pengujian yang terakhir menunjukkan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan melalui *Good Corporate Governance* sebagai variabel intervening, hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility based on stakeholders perspective* memiliki potensi yang besar dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan tanggungjawab sosial tersebut lebih dilihat dari perspektif kebutuhan *stakeholders*, bukan dari perspektif motif yang ingin dicapai manajemen semata, sehingga memberikan pengertian bahwa kinerja perusahaan bukan tidak penting untuk diungkapkan, melainkan kinerja perusahaan membutuhkan media tepat dan efektif untuk mengungkapkan, terlebih bagi *stakeholders* yang relatif kurang akses dan paham terhadap laporan tahunan (*annual report*).

Candrayanthi dan Saputra (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja perusahaan, penelitian ini menggunakan sampel

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. CSR diukur dengan *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) yaitu dengan membandingkan jumlah CSR yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan. Dan variabel dependen kinerja perusahaan diukur dengan ROA, ROE, dan NPM. *Return On Assets* (ROA) diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset untuk mengetahui seberapa besar nilai pengembalian atas penggunaan aset yang dimiliki perusahaan, *Return On Equity* (ROE) diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan total modal sendiri untuk menghasilkan laba, dan yang terakhir *Net Profit Margin* (NPM) diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total penjualan bersih. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan tiga kali pengujian karena kinerja perusahaan diwakili oleh tiga rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan CSR berpengaruh positif terhadap ROA perusahaan pertambangan, hasil tersebut menunjukkan bahwa mengungkapkan CSR kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA akan meningkat. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap ROE perusahaan pertambangan, hasil tersebut menunjukkan bahwa mengungkapkan CSR kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA akan meningkat. Hasil pengujian atas hipotesis yang terakhir menunjukkan CSR berpengaruh negatif terhadap NPM perusahaan pertambangan,

hasil tersebut menunjukkan bahwa mengungkapkan CSR kinerja perusahaan yang diukur dengan NPM akan mengalami penurunan.

Nuswandari (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Governance Perception Index* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *corporate governance* perusahaan dengan kinerja perusahaan, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Variabel independen dalam penelitian Nuswandari yaitu *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) diukur dengan skor penilaian tingkat penerapan *corporate governance* di perusahaan, dan terdapat 3 variabel kontrol yaitu komposisi aktiva yang diukur dengan menggunakan rasio antara aktiva tetap terhadap penjualan, kesempatan pertumbuhan yang diukur dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan selama tiga tahun terakhir, dan ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan log natural dari penjualan. Serta variabel dependen kinerja perusahaan diukur dengan ROE yang merupakan proksi dari kinerja operasional dan Tobin's Q yang merupakan proksi dari kinerja pasar. Objek penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2005. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *agency*. Hasil penelitian untuk ROE sebagai variabel dependen menunjukkan variabel CGPI secara positif signifikan mempengaruhi kinerja operasi, dan hanya satu variabel kontrol yang secara statistik signifikan mempengaruhi ROE yaitu variabel ukuran perusahaan, sedangkan variabel komposisi aktiva dan kesempatan pertumbuhan

tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap kinerja operasi, hasil tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi perusahaan, dengan *governance* yang baik akan memiliki kinerja operasional yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meminimalkan biaya dan resiko. Hasil yang kedua untuk Tobin's Q sebagai variabel dependen menunjukkan variabel CGPI secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar (Tobin's Q), dan juga tidak ada satupun variabel kontrol yang secara statistik mempengaruhi kinerja pasar. Hal ini mungkin karena respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi perlu membutuhkan waktu.

Novrianti, Gusnardi, dan Armas (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, komisaris independen, dan ukuran audit secara simultan dan parsial terhadap kinerja perusahaan, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen CSR diukur dengan *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) yaitu dengan membandingkan jumlah CSR yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan. Dan untuk variabel independen GCG diukur dengan proksi Kepemilikan Manajerial (KM) dinilai dengan jumlah saham manager dibagi dengan jumlah saham yang beredar, Kepemilikan Institusional (INST) dinilai

dengan jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar, Ukuran Dewan Direksi (BOARD) dinilai dengan total dewan direksi, Komisaris Independen (KI) dinilai dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh komisaris, dan Ukuran Komite Audit dinilai dengan total komite audit. Sedangkan variabel dependen kinerja perusahaan diukur dengan *Return On Equity* (ROE) laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE sebagai proksi dari kinerja perusahaan, hal ini mungkin disebabkan minimnya pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan manufaktur dan juga belum adanya suatu standar dari pemerintah untuk penerapan CSR. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*, mereka menerapkan *good corporate governance* didasarkan pada kepatuhan pada peraturan saja dan belum tertarik pada manfaat jangka panjang atas penerapan *good corporate governance*.

Retno dan Priantinah (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai

perusahaan, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan penilaian CGPI meliputi empat tahap yaitu *self-assessment* dengan bobot 15%, pengumpulan dokumen perusahaan dengan bobot 25%, penyusunan makalah dan presentasi 12%, dan observasi ke perusahaan 48%. Dan untuk variabel independen *Corporate Social Responsibility* diukur dengan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yaitu dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan GRI meliputi 79 item. Dalam penelitian ini terdapat variabel kontrol yang terdiri dari Ukuran perusahaan (*Size*) yang diukur dengan log (nilai buku total asset), Jenis industri yang diklasifikasikan oleh BEI dalam *Fact Book* sehingga diperoleh klasifikasi *Mining, Consumer goods industry, Property real estate and building construction, Infrastructure, utilities & transportation, Finance, Trade, service & investment*, dan *Miscellaneous industry*, Profitabilitas diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA) laba bersih dibagi dengan total aktiva, dan *Leverage* diukur dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Sedangkan variabel dependen nilai perusahaan diukur dengan total nilai pasar ekuitas dengan nilai buku dari total utang dibagi dengan total nilai buku dari ekuitas dibagi dengan total nilai buku dari total utang. Objek penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2010. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, teori legitimasi, teori *stakeholder*, teori

kontrak sosial, dan teori persinyalan. Hasil penelitian ini menunjukkan GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage*, hal ini karena perusahaan besar lebih sulit untuk dimonitor sehingga membutuhkan penerapan *corporate governance*. Hasil yang kedua menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, jenis industri, profitabilitas, dan *leverage*. Hal ini disebabkan karena kualitas pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEI masih sangat rendah pada tahun penelitian dan hanya sedikit perusahaan yang sudah mengikuti standar yang dikeluarkan oleh GRI, sehingga kualitas pengungkapan CSR didalam perusahaan menjadi faktor yang menyebabkan praktik CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan hasil yang ketiga menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan GCG dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*) Brigham & Houston (2006;26-31). Keagenan muncul karena adanya hubungan antara satu orang atau lebih (*principal*) untuk mempekerjakan orang lain (*agent*) dengan memberikan suatu jasa dan kemudian memberikan hak untuk pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Berjalannya proses keagenan *principal*

memperoleh suatu hasil berupa pembagian deviden, sedangkan agen memperoleh sebuah imbalan berupa gaji, bonus, insentif, dan berbagai kompensasi lainnya.

Teori keagenan menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetric*), kondisi seperti ini manajer selaku pengelola perusahaan lebih mengetahui banyak tentang informasi internal perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik/pemegang saham. Untuk itu manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi yang terjadi pada perusahaan kepada pemilik/pemegang saham, akan tetapi informasi yang diterima oleh pemilik/pemegang saham tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang terjadi pada perusahaan. Hal ini dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan dari pemilik/pemegang saham. Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetris informasi, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*).

Teori keagenan memerlukan pengawasan khusus, yaitu dengan mekanisme GCG, yang merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemegang saham, sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimalis biaya keagenan. Konsep penerapan GCG bertujuan meyakinkan kepada pemegang saham bahwa manajer akan memberikan keuntungan dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan para pemegang saham.

### **2.2.2 Teori Stakeholders**

*Stakeholders* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi dan bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholders* mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholders*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan.

Yang termasuk *stakeholders* adalah pemegang saham, para kreditor, pekerja/karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, serta lingkungan sekitar maupun lingkungan luas. Menurut Dewi dan Widagdo (2012) teori *stakeholders* menekankan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang menuntut dia harus mempertimbangkan semua kepentingan berbagai pihak yang terkena pengaruh dari tindakannya. Terjalannya hubungan tersebut akan memacu perusahaan untuk dapat menjalankan bisnis perusahaan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

### **2.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tanggung Jawab Sosial atau biasa disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. CSR merupakan usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen perusahaan

terhadap kelompok-kelompok dan individual-individual dalam lingkungan perusahaan tersebut.

CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan juga sosial kedalam aktivitas operasi perusahaan. Perhatian yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan sekitar merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik suatu bisnis yang tidak dapat diukur secara keuntungan finansial, tetapi perusahaan juga harus berkomitmen kepada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan dilaporkan dalam laporan *Sustainability Reporting*, *Sustainability Reporting* adalah perlaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi, dan produknya didalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) dalam Firdausi 2009.

Standar pengungkapan CSR merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*) karena lebih memfokus pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, pemanfaatan *sustainability reporting* serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi.

#### **2.2.4 Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui

pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009;1). Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Maksud dan tujuan dibuat peraturan menteri mengenai GCG agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberdayaan dan hidup berkelanjutan untuk mencapai titik maksimal suatu perusahaan. Pengertian serta konsep GCG dilandasi oleh teori keagenan dimana manajemen selaku pengelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan agar pengelolaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan.

Pedoman Umum GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, adapun prinsip-prinsip yang mendasari terbitnya pedoman tersebut, antara lain :

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan terciptanya GCG, prinsip-prinsip tersebut harus ditanamkan pada perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, dan dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

#### **2.2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris**

Pada pedoman umum GCG tahun 2006, Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif kepada perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan GCG. Peran yang dimiliki dewan komisaris sangat diperlukan dalam mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris, manajemen diharapkan dapat lebih memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta dapat meningkatkan standar kinerja manajemen dalam perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Menurut KNKG (2006), agar pelaksanaan tugas dean komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

#### **2.2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris Independen**

Menurut KEP-643/BL/2012 komisaris independen adalah bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Keberadaan dewan komisaris independen menjadi penting, karena kondisi dilapangan sering ditemukan terdapat transaksi yang melenceng dari kepentingan perusahaan yang dapat merugikan *stakeholders*. Komisaris independen diharapkan dapat menunjang penerapan GCG pada suatu perusahaan, dengan melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada para Dewan Direksi secara efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Posisi komisaris independen dalam perusahaan juga sebagai ketua komite audit dan komite nominasi.

### 2.2.4.3 Ukuran Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan tentang komite audit dalam Effendi, 2006;25, suatu komite audit yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Menurut Keputusan dari ketua Bapepam, nomor: KEP-643/BL/2012 menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Komite audit merupakan akses penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam masalah pengendalian. Pemegang saham sebagai pihak eksternal perusahaan tidak dapat mengamati secara rinci mengenai kualitas laporan yang diinformasikan kepadanya. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, serta dapat mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

#### **2.2.4.4 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Peningkatan tersebut tentunya menuju pada suatu yang lebih baik, yang akan dirasakan manfaatnya oleh *stakeholders*, terutama para pemegang saham.

Dengan adanya pengawasan yang semakin ketat terhadap manajemen hendaknya tanggung jawab manajemen dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan juga semakin meningkat, yang diharapkan kinerja yang dicapai perusahaan akan lebih maksimal sehingga nilai pengembalian yang didapat oleh pemegang saham institusional juga akan lebih tinggi.

#### **2.2.5 Kinerja Perusahaan**

Kinerja perusahaan merupakan pengukuran atas prestasi perusahaan yang timbul akibat proses pengambilan keputusan manajemen, karena memiliki hubungan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan modal dari kegiatan operasi perusahaan. Menurut Purwani (2010) efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi merupakan sebuah rasio antara masukan dan pengeluaran yakni dengan pengeluaran tertentu dapat menghasilkan suatu masukan yang optimal.

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dari suatu perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder* dan *shareholder*). Untuk mencapai sasaran tersebut, seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan harus bekerja sama secara sistematis demi menghasilkan kinerja yang optimal. Selain dapat memberikan laba bagi pemilik modal atau investor, perusahaan yang memiliki kinerja yang baik juga dapat menunjukkan kemampuan membayar hutang dengan tepat waktu.

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Good Corporate Governance* (GCG)**

Pada pedoman umum GCG (2006), terdapat 5 (lima) asas GCG yang harus diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Salah satu asasnya yaitu *Responsibilitas*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan CSR yaitu organ perusahaan yang terdiri dari Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Pemegang Saham harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.

CSR dilaksanakan maka GCG akan memadai, karena dengan dilakukannya CSR pada lingkungan perusahaan maka akan dapat memberi jaminan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik (Gunawan dan Yeremia A.P 2008 dalam Dewi dan Widagdo 2012). Sehingga dalam penerapan CSR diharapkan dapat meningkatkan upaya perusahaan dalam praktik GCG yang dapat menjadikan perusahaan memiliki daya saing tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Ukuran Dewan Komisaris (UDK).

H<sub>2</sub> : *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI).

H<sub>3</sub> : *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Ukuran Komite Audit (UKA).

H<sub>4</sub> : *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Ukuran Kepemilikan Institusional (UKI).

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris (UDK) terhadap Kinerja Perusahaan**

Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang banyak membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin

menurun (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998 dalam Dewi dan Widagdo 2012).

Namun sebaliknya dengan penelitian Widagdo dan Chariri 2014 yang menyatakan bahwa dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasehat dan masukan untuk dewan direksi pun menjadi lebih banyak, sehingga kinerja dari manajemen menjadi lebih baik dan berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Ukuran Dewan Komisaris (UDK) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.

### **2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) terhadap Kinerja Perusahaan**

Perseroan memiliki dewan komisaris, yang mana dewan komisaris diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pemegang saham. Status independen terfokus pada tanggung jawab dan kewajiban komisaris untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktek kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya komisaris independen dapat memberikan jaminan bagi para pemegang saham untuk menanamkan sahamnya yang digunakan sebagai modal operasi perusahaan, yang diharapkan dapat mencapai target perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Novrianti, Gusnardi, dan Armas (2012) menemukan tidak

adanya pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Namun sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Widagdo (2012), dalam penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh secara signifikan antara ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.

H<sub>6</sub> : Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.

#### **2.3.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit (UKA) terhadap Kinerja Perusahaan**

Sesuai dengan KNKG 2006, komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nuryanah (2004) dalam Dewi dan Widagdo (2012) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Effendi (2005) yang menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H<sub>7</sub> : Ukuran Komite Audit (UKA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.

### **2.3.5 Pengaruh Ukuran Kepemilikan Institusional (UKI) terhadap Kinerja Perusahaan**

Sesuai dengan teori keagenan, para manajer diberi kekuasaan oleh pemegang saham untuk menjalankan bisnis perusahaan dan membuat keputusan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Dewi dan Widagdo (2012) menyatakan dengan peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan peranan kepemilikan manajerial dalam rangka meminimumkan *agency cost* dalam perusahaan.

Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian McConnell dan Servaes (1990) dalam Triyono (2014) menemukan bahwa proporsi kepemilikan institusional secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H<sub>8</sub> : Ukuran Kepemilikan Institusional (UKI) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.

### **2.3.6 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel intervening**

CSR merupakan wujud aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya, karena dalam pengambilan suatu keputusan tidak hanya mempertimbangkan dari segi *financial* saja, tetapi juga harus berdasarkan

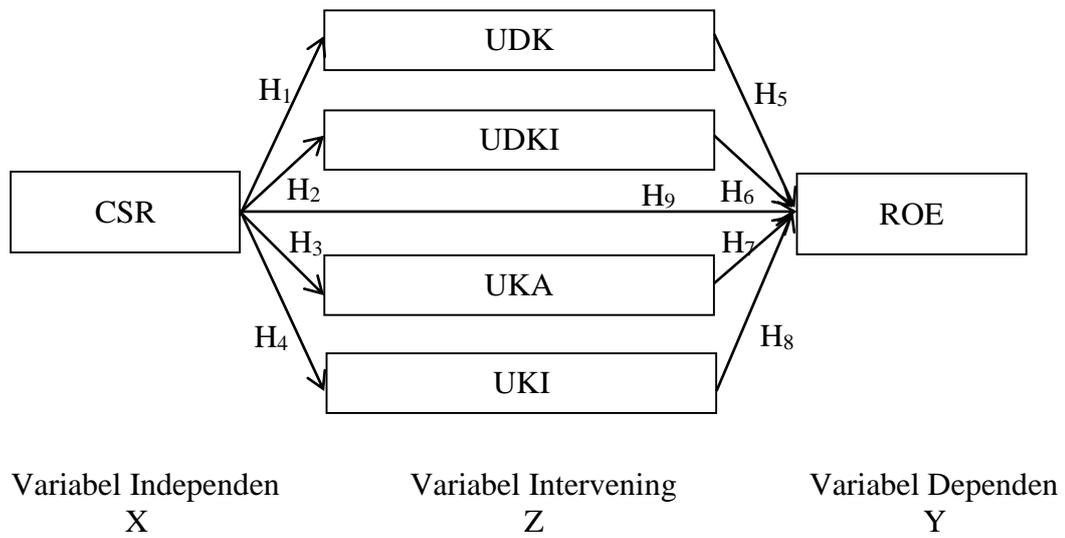
konsekuensi sosial dan lingkungan. Maka semakin baik perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya, akan tercipta suatu nilai perusahaan yang baik dimata para *stakeholders* termasuk didalamnya konsumen maupun investor yang berarti menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin meningkat.

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Nurdin dan Cahyandito (2006) dalam Candrayanthi dan Saputra (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi investor, dimana investor di Indonesia sudah mulai menggunakan informasi sosial dan lingkungan dalam melakukan keputusan investasi. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

H<sub>9</sub> : *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel intervening.

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Untuk mempermudah memahami tentang pengaruh penerapan GCG dan CSR terhadap kinerja perusahaan, maka dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**